

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran seorang kepala atau pemimpin dalam sebuah organisasi tentunya sangatlah penting, mengingat bahwa seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dituntut agar dapat mengelola organisasi yang dipimpinnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, seorang kepala atau pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kinerja para bawahannya sehingga pada akhirnya bawahan tersebut dapat meningkatkan prestasi kerja secara baik dan profesional agar nantinya dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya, setiap pemimpin memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mendorong orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung pada tingkat kekuatan yang mereka miliki, serta tingkat motivasi yang mereka berikan kepada bawahan. Sehingga seorang pemimpin haruslah menerapkan gaya kepemimpinan yang strategis dan efektif agar dapat menciptakan integrasi yang serasi, mendorong gairah kerja anggota atau bawahan untuk mencapai tujuan yang maksimal, menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi serta loyalitas. Maka dari itu, gaya kepemimpinan dan situasi yang diterapkan oleh seorang pemimpin akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai oleh para anggota atau bawahannya. Dengan meningkatkan kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud. Sebaliknya kelemahan kepemimpinan

merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia (Istianto,2009:2).

Dalam instansi pemerintahan yaitu Kecamatan memerlukan adanya pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Seorang camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota madya yang berkedudukan untuk memimpin sebuah wilayah kecamatan. Keududukan camat yang dimaksud disini juga dituangkan dalam PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 14 ayat (1) dan (2) . Camat ini diangkat dan dilantik langsung oleh bupati atau walikota. Oleh sebab itu, seorang camat bertanggung jawab langsung kepada walikota atau bupati.

Pengangkatan camat diperuntukkan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat atas dasar usulan dari sekretaris daerah. Seseorang yang dipilih menjadi camat harus memiliki kecakapan tentang pengetahuannya mengenai teknis pemerintahan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat menjadi camat juga telah diatur dalam PP No. 19 Tahun 2008 Pasal 24, 25, dan 26.

Sedangkan tugas umum camat sebagai pemimpin bertanggung jawab atas administratif kecamatan agar mencapai tujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan maka dibutuhkannya seorang camat sebagai pemimpin. Tugas umum camat berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 tentang kecamatan

dan PP No. 41 Tahun 2007, seorang camat memiliki tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dengan melihat adanya tugas dan tanggung jawab seorang camat yang demikian besar dalam menjalankan roda pemerintahan kecamatan, maka dalam pencapaian tujuan camat perlu mendayagunakan, mengarahkan dan memotivasi pegawai untuk selalu secara aktif melakukan aktifitas yang positif kearah pencapaian tujuan organisasi kecamatan.

Kantor camat Amarasi, merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan sebagian urusan pemerintahan daerah. Sebagai perangkat daerah tentu memikul tanggung jawab yang begitu berat, hal ini tentu membutuhkan kesiapan dari pemimpin dan seluruh pegawai yang ada di kecamatan khususnya di Kantor camat Amarasi.

Dari hasil pantauan peneliti terlihat bahwa ada beberapa masalah yakni, saat ini yang memimpin di Kantor Kecamatan bukan Camat tetapi pejabat pelaksana tugas (PLT). PLT merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin yang merupakan salah satu bentuk mandat. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian (“SKBKN 26/2016”), maka PLT tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat

strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Yang berikutnya adalah ketidaklengkapan sarana dan prasarana, yaitu kekurangan komputer dan alat printer. Hanya ada satu laptop dan satu printer yang tersedia, jadi semua pegawai dan pemimpin menggunakan laptop pribadi. Selanjutnya terkait dengan transportasi, pemimpin dan staf tetap menggunakan mobil pribadi atau motor mereka sendiri saat menjalankan tugas di Kantor Camat Amarasi karena tidak ada mobil dinas atau motor.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Kepemimpinan Camat di Kantor Camat Amarasi” menarik perhatian penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di paparkan tersebut di atas, maka dikemukakan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepemimpinan camat di Kantor camat Amarasi ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan camat di Kantor camat Amarasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk medeskripsikan peran kepemimpinan camat di Kantor camat Amarasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan camat di Kantor camat Amarasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Camat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinannya.

2. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan aparatur Kecamatan.

3. Akademis dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan dan kepuasan kerja.